

RECANA KERJA

KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN PURI

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Puri Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Puri, Desember 2022



NARULITA PRISWIANDINI, SSTP, M.Med.Kom

Pembina

NIP. 19810402 199112 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Puri merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Puri yang selanjutnya disingkat dengan Rancangan Renja Kecamatan Puri adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Puri yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Puri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Puri sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Puri ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai : Tugas pokok dan fungsi , permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Puri pada tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana table 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Realisasi Belanja pada Kecamatan Puri Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		Selisih (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84.43		101
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indicator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100 %	99.87	99.87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,500,000.00	7.500,000.00	0.00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,500,000.00	70480.900.00	19,100.00	99.75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81 %	95 %	117
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.607.491.000.00	2.464.987.140.00	142.503.860.00	94.53
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat daerah	60	73.33	122
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.400.000.00	26.224.000.00	176,000.00	99.33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	4,987.000.00	13.000.00	99.74
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.445.100.00	149.596.150.00	5.848.950.00	96,24
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,000,000.00	26,971,000.00	29.000,00	99.89
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,000,000.00	7.000.000.00	0.00	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.0000.00	2.900.000.00	100.00	96.67
	Penyediaan Bahan/Material	28,000,000.00	27,000,000.00	0.00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,000,000.00	14.914.000.00	2.086.000.00	87.73
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				

	Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.730.696.00	35.894.055.00	14.836.641.00	70.75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28,000,000.00	27.063.152.00	936.848.00	96.65
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	495,000,000.00	462.820.000.00	32.180.000.00	93.50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksanakan	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,500,000.00	31,150,000.00	1,350,000.00	95.85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.327.100.00	121.376.000.00	7.950.150.00	93.85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	9.780.000.00	220.000.00	97.80
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	100 %	100 %	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai SP	1000	696	69.69
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	35.000.000.00	34.822.000.00	178.000.00	99.49
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28	28	100
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	106.099.500.00	102.420.600.00	3.678.900.00	96.53

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36.000.000.00	35.200.000.00	800.000.00	97.78
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90,000,000.00	88.941.500.00	1.058.400.00	98.82
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	110.000.000.00	107.528.000.00	2.472.000.00	97.75
Jumlah	4.028.993.396.00	3.812.556.547.00	216.436.849.00	94.63

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	80	82	83	100	83		100

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen		100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen		100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi anggaran perangkat daerah	82 %	79 %	79 %	81 %	100	81 %		100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	38 laporan	38 laporan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	60 laporan	60 laporan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	55	54	54	54	100	55		100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	30 stel	30 Stel	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	90%	90%	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%

		perkantoran								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100%	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	90%	90 %	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	1 unit	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		100%
7.01.02	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	81	79	82	84	100	81		100 %
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%						

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %						
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %						
		Prosentase Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %						
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi ,fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	100%	100%						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	16 desa		100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	16 desa		100
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	16 desa		100

	dengan Pembangunan Desa	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	16 desa		100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	16 desa		100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Puri

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM
		Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Puri

Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah			80	82	83	84	80,96	82,43	83	84	Baik
2	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	Baik
3	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, yang ditindak lanjuti bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Puri diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Puri

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Puri bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Puri yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Puri;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Puri namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga , pariwisata untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Puri yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Puri untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Puri	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	3.748.810.922	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Puri	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	3.748.810.922	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Presentase indicator Petrangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100 %	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Presentase indicator Petrangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100 %	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 dokumen	7.500.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90 %	3.369.810.922	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90 %	3.369.810.922	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puri	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Laporan	3.361.810.922	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puri	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Laporan	3.361.810.922	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puri	Jumlah laporan Keuangan bulanan	60 Laporan	8.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puri	Jumlah laporan Keuangan bulanan	60 Laporan	8.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Puri	IP ASN Perangkat Daerah	55	17.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Puri	IP ASN Perangkat Daerah	55	17.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puri	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 stel	17.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puri	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 stel	17.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	177.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	177.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puri	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puri	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Puri	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan	1 paket	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan	Kec. Puri	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan	1 paket	90.000.000	

Kantor		kantor yang disediakan			Perlengkapan Kantor		kantor yang disediakan			
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Puri	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	27.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Puri	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	28.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Puri	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	7.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Puri	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	7.000.000	
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Puri	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bln	3.000.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Puri	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bln	3.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Kec. Puri	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	28.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Puri	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	27.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	17.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	17.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Puri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	90 %	73.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Puri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	90 %	73.000.000	

	Daerah		pemerintahan daerah sesuai kebutuhan			Daerah		pemerintahan daerah sesuai kebutuhan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puri	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puri	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puri	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 Orang	28.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puri	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 Orang	28.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90 %	96.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90 %	96.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Puri	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 kendaraan	32.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Puri	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 kendaraan	32.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kec. Puri	Jumlah kendaraan		32.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kec. Puri	Jumlah kendaraan	2 kendaraan	32.500.000	

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	n		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 gedung	21.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 gedung	21.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Puri	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	50.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Puri	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	50.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Kec. Puri	Prosentase pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100 %	50.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Kec. Puri	Prosentase Perijinan dan Non Perijinan yang	100 %	50.000.000	

	Camat		yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			Camat		terlayani sesuai Standar Pelayanan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Puri	Prosentase Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Puri	Prosentase Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Puri	Prosentase Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	15.000.000		Kec. Puri	Prosentase Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	15.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	269.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	269.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,	16 desa	269.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,	16 desa	269.000.000	

			kesejahteraan masyarakat					kesejahteraan masyarakat			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Desa	48.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Desa	48.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Desa	36.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Desa	36.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Desa	90.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Desa	90.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 Desa	95.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 Desa	95.000.000	
JUMLAH					4.067.310.922	JUMLAH					4.067.310.922

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1 Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes;
- 2 Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- 3 Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing -masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan, terdapat usulan dari pemangku kepentingan berupa tambahan pagu indikatif sebesar Rp 150.000.000,- untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Rincian atas usulan tersebut secara rinci terdapat pada tabel 2.6 (T-C 32) berikut:

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Puri

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Puri	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dpt dipenuhi	Rp. 150.000.000	Tambahan pagu indikatif

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Puri ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019 – 2022. Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayananab public yang Optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	66	67	68	69	70
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	82	84	85	86	87	88

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Puri Tahun 2023 mengacu pada Tujuan Kecamatan Puri yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA
 - 3) Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA
 - 4) Koordinasi dan penyusunan DPA
 - 5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pengadaan Mebel
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
KODE SKPD							
NAMA SKPD		OPD KEC.PURI					
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	85	3.111.839.000	3.461.884.900
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100	100	15.000.000	15.000.000
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000

7.01.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	9.000.000	9.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	83%	2.479.979.000	2.676.445.000
7.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan		2.476.979.000	2.673.445.000
7.01.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43 Dokumen		3.000.000	3.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	61	62	15.439.900	65.439.900
7.01.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	20.000.000
7.01.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	15.439.900	45.439.900
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	90%	252.900.000	322.000.000
7.01.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	12.000.000
7.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	150.700.000	98.500.000
7.01.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28.500.000	30.000.000
7.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.500.000	125.000.000
7.01.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.200.000	4.500.000

7.01.01.2.06 .07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	32.000.000
7.01.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000	20.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	90%	90 %	54.000.000	60.000.000
7.01.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.000.000	60.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100 %	127.020.100	129.000.000
7.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	47.020.100	49.000.000
7.01.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	80.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	90 %	167.500.000	194.000.000
7.01.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	52.500.000	66.000.000
7.01.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	90.000.000	102.000.000
7.01.01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	25.000.000	26.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100 %	45.000.000	47.500.000

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	700pelayanan	750 Pelayanan	45.000.000	47.500.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	30 Laporan	30 Laporan	45.000.000	47.500.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100 %	366.740.000	384.200.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 Dokumen	23 Dokumen	366.740.000	384.200.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	81.440.000	87.500.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	47.300.000	53.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	102.000.000	105.700.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	5 Dokumen	136.000.000	148.000.000
JUMLAH TOTAL					3.523.579.000	3.942.834.900

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian

kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN RINCIAN TAHUN 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB
				OUTPUT	OUTCOME			(Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00	Kec. Puri	Rp 3.111.839.000,00
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	Kec. Puri	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		100%		Rp 15.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		Rp 2.000.000
	<i>Rincian :</i>							
	<i>Penyusunan Dokumen Renja</i>			<i>Jumlah Dokumen Renja</i>		1 Dokumen		Rp 1.000.000
	<i>Penyusunan Dokumen P-Renja</i>			<i>Jumlah Dokumen Renja Perubahan</i>		1 Dokumen		Rp 1.000.000
7.01.01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		Rp 1.000.000
	<i>Rincian :</i>							
	<i>Penyusunan RKA</i>			<i>Jumlah Dokumen RKA</i>		1 Dokumen		Rp 1.000.000
7.01. 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA			Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA		1 Dokumen		Rp 1.000.000

	Rincian :						
	<i>Penyusunan P-RKA</i>			<i>Jumlah Dokumen P-RKA</i>		1 Dokumen	Rp 1.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp 1.000.000
	Rincian :						
	<i>Penyusunan DPA</i>			<i>Jumlah Dokumen DPA</i>		1 Dokumen	Rp 1.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA			Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA		1 Dokumen	Rp 1.000.000
	Rincian :						
	<i>Penyusunan P-DPA</i>			<i>Jumlah Dokumen P-DPA</i>		1 Dokumen	Rp 1.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Laporan	Rp 9.000.000
	Rincian :						
	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan</i>			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan</i>		4 Laporan	Rp 1.000.000
	<i>Penyusunan Dokumen LKjIP</i>			<i>Jumlah Laporan LKjIP</i>		1 Laporan	Rp 750.000
	<i>Penyusunan Dokumen LRA</i>			<i>Jumlah Laporan LRA</i>		12 Laporan	Rp 500.000
	<i>Penyusunan Dokumen CALK</i>			<i>Jumlah Laporan CALK</i>		1 Laporan	Rp 1.000.000
	<i>Penyusunan Dokumen SAKIP</i>			<i>Jumlah Laporan SAKIP</i>		1 Laporan	Rp 1.500.000
	<i>Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi</i>			<i>Jumlah Laporan</i>		1 Laporan	Rp 2.500.000
	<i>Sinergitas Kecamatan</i>			<i>Jumlah Laporan</i>		1 Laporan	Rp 1.750.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		82%	2.479.979.000,00

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.476.979.000
	Rincian :				
	Penyediaan Gaji ASN			26 Orang/Bulan	Rp 1.173.365.000
	Penyediaan Tunjangan ASN			26 Orang/Bulan	Rp 1.483.614.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43 Dokumen	Rp 3.000.000
	Rincian :				
	Dokumen Prognosis		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.000.000
	Dokumen Belanja Fungsional		Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Rp -
	Dokumen Rekonsiliasi Aset		Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Rp 500.000
	Dokumen Rekonsiliasi Akuntansi		Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Rp 500.000
	Berita Acara Cash Opname (Tri Wulan)		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Rp 500.000
	Berita Acara Opname Persediaan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 500.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	61	Rp 15.439.900
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Rp 15.439.900
	Rincian :				
	Bimtek Peningkatan ASN		32 Orang peserta		
	Mamin Peserta 30 orang				Rp 2.010.000
	Mamin Narasumber 2 orang				Rp 134.000
	Honor Narasumber 2 orang				Rp 1.600.000

	Sewa Gedung						Rp 3.162.900
	Banner						Rp 208.000
	Serifikat						Rp 75.000
	Transport						Rp 3.000.000
	Tas Pelatihan						Rp 5.000.000
	ATK						Rp 250.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		90%	Rp 252.900.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 10.000.000
	Rincian :						
	Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya			1 Paket Pengadaan Komponen Listrik		1 Paket	Rp 10.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Rp 150.700.000
	Rincian :						
	Laptop , Printer, AC, Komputer, CCTV, Mesin Foto Copy dll						Rp -
	AC Portable			2 Unit			Rp 60.000.000
	CCTV 4 chanel			1 unit			Rp 6.500.000
	Kipas angin dinding			6 unit			Rp 4.500.000
	Monitor TV			1 unit			Rp 3.500.000
	Mic			1 Pt			Rp 3.500.000
	Amplifyer			1 unit			Rp 3.000.000

	APAR		6 bh				Rp 2.700.000
	Printer		2 bh				Rp 7.000.000
	Laptop		5 bh				Rp 60.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket		Rp 28.500.000
	Rincian :						
	Makanan dan Minuman Rapat		12 Paket Makanan dan Minuman				Rp 28.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket		Rp 7.500.000
	Rincian :						
	foto copy , Cetak Lembar SPPD , Cetak Amplop Dinas , Cetak Map Dinas , Cetak Kop Dinas		2 Paket Pengadaan Barang Cetak				Rp 7.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen		Rp 3.200.000
	Rincian :						
	Koran (2),				1 Dokumen (12 bln)		Rp 1.620.000
	Buku				1 Dokumen		Rp 320.000
	Majalah				1 Dokumen		Rp 1.260.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 Paket		Rp 30.000.000
	Rincian :						
	ATK (12 bulan)				12Paket (Penyediaan tiap bulan)		Rp 30.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		Rp 18.000.000

	Rincian :						
	<i>SPPD</i>					12 Laporan	Rp 18.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi		90%	Rp 54.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	Rp 54.000.000
	Rincian :						
	<i>Meja Rapat, Kursi Rapat, Almari, Kursi Tamu, dll</i>						Rp -
	<i>Kursi Rapat</i>			<i>Kursi Rapat (60 buah)</i>		1 paket	Rp 39.000.000
	<i>Almari</i>			<i>Almari (5 bh)</i>		1 paket	Rp 15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Rp 127.020.100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	Rp 47.020.100
	Rincian :						
	<i>Listrik Kantor</i>					12 Laporan	Rp 38.020.100
	<i>Kebutuhan Telepon dan Internet Kantor</i>					12 Laporan	Rp 9.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp 80.000.000
	Rincian :						
	<i>Tenaga Administrasi Kantor (2 orang)</i>			<i>12 Laporan</i>			Rp 27.900.000
	<i>Tenaga Keamanan Harian</i>			<i>521 Laporan</i>			52.100.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		90%	Rp 167.500.000

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Unit	Rp 52.500.000
	Rincian :					
	<i>Pajak ,</i>				2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)	Rp 2.500.000
	<i>BBM</i>				1 Unit (1 Mobil)	Rp 30.000.000
	<i>Service Kendaraan Dinas</i>				1 Unit (1 Mobil)	Rp 20.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Rp 90.000.000
	Rincian :					
	<i>Pemeliharaan Gedung</i>				1 Unit	Rp 30.000.000
	<i>Pemeliharaan Pendopo</i>				1 Unit	Rp 40.000.000
	<i>Pemeliharaan Rumah Dinas</i>				1 Unit	Rp 20.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	Rp 25.000.000
	Rincian :					
	<i>Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll</i>		10 Unit			Rp 25.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100,00%	Rp 45.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		700 pelayanan	Rp 45.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		30 Laporan	Rp 45.000.000

	Rincian :						
	Sosialisasi Bidang Pelayanan , Monev , Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan			1 Laporan Hasil Sosialisasi Bidang Pelayanan , 5 Laporan Hasil Monev , 12 Laporan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan , 12 Laporan Bidang Pelayanan			Rp 45.000.000
	SKM (mendukung Program Bupati pada Misi 3)			1 Laporan			Rp 10.000.000
	Sosialisasi Bidang Pelayanan			1 Laporan			Rp 20.000.000
	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan			12 Laporan			Rp 5.000.000
	Evaluasi Pelayanan			12 Laporan			Rp 10.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Rp 366.740.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		23 Dokumen	Rp 366.740.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Rp 81.440.000
	Rincian :						
	Evaluasi Raperdes APBDES dan P-APBDES			32 berkas			Rp 4.800.000
	Evaluasi Raperdes Pertanggungjawaban APBDES			16 berkas			Rp 2.400.000
	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa			16 desa			Rp 24.000.000
	Konferensi Desa			12 bulan			Rp 24.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			3 kegiatan			Rp 6.000.000
	Asistensi penyusunan RKPDEsa			16 desa			Rp

							2.400.000
	<i>Fasilitasi Penantusahaan Keu Desa</i>		<i>1 kegiatan</i>				Rp 3.000.000
	<i>Fasilitasi Penantusahaan aset desa</i>		<i>1 kegiatan</i>				Rp 3.000.000
	<i>Fasilitasi produk hukum desa</i>		<i>1 kegiatan</i>				Rp 3.000.000
	<i>Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan</i>		<i>24 kali</i>				Rp 3.840.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen		Rp 47.300.000
	Rincian :						
	<i>Musrenbang</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 13.790.000
	<i>Musrebang Khusus (Tematik)</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 3.468.000
	<i>Pramusrebang</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 3.670.000
	<i>Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 2.483.000
	<i>Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 3.350.000
	<i>Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 5.598.000
	<i>Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 8.033.000
	<i>Kegiatan BBGRM</i>		<i>1 Dokumen</i>				Rp 6.908.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen		Rp 102.000.000
	Rincian :						

	Honorarium Tim Forkopimca (2 orgX 12X750.000)			1 Dokumen				Rp 18.000.000
	Apel Linmas			1 Dokumen				Rp 42.000.000
	Pemantauan dan Pengamanan Wilayah			1 Dokumen				Rp 7.200.000
	Tanggap Bencana			1 Dokumen				Rp 24.800.000
	Penertiban dan Penegakan Perda			1 Dokumen				Rp 10.000.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 Dokumen		Rp 136.000.000
	<i>Rincian :</i>							
	<i>Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat</i>			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat</i>		<i>1 Dokumen</i>		Rp 12.000.000
	<i>Silaturahmi dan doa bersama TOGA dan TOMAS</i>							Rp 12.000.000
	<i>Hibah Sapi</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>1 Dokumen</i>		Rp 37.000.000
	<i>Pemberdayaan Masyarakat (mendukung Program Prioritas BUPATI)</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>1 Dokumen</i>		Rp 79.000.000
	<i>Forum Anak</i>							Rp 11.000.000
	<i>Bimtek Karang Taruna</i>							Rp 10.000.000
	<i>Buka Bersama Anak Yatim</i>							Rp 13.000.000
	<i>Pelatihan dan Lomba PKK</i>							Rp 30.000.000
	<i>Bunda PAUD</i>							Rp 10.000.000
	<i>Stantting</i>							Rp 5.000.000

	<i>Pencegahan dan Penanganan Wabah</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>1 Dokumen</i>		Rp 2.000.000
	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>1 Dokumen</i>		Rp 6.000.000
	TOTAL USULAN ANGGARAN TAHUN 2023							Rp 3.523.579.000,00

BAB V PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dawarblandong, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Puri, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
-

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2023 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Puri diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.
